

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara dua individu yang berbeda kepentingan yaitu prinsipal dan agen dimana hubungan agensi diartikan sebagai suatu kontrak dibawah satu prinsipal atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsip utama teori ini adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “nexus of contract”. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Sedangkan agen diartikan sebagai seorang manajer yang akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi lain agen juga merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal dan berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya.

Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*) dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan

yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*). Dengan tujuan memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang memenuhi dua asumsi, yaitu sebagai berikut ini :

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Pada kenyataannya sering terjadi masalah keagenan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Masalah keagenan akan muncul ketika terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi. Prinsipal menginginkan hasil akhir keputusan yang menghasilkan laba sebesar-besarnya atau peningkatan nilai investasi dalam perusahaan. Agen pun pasti memiliki kepentingan pribadi yang ingin dicapai yakni penerimaan kompensasi yang memadai atas kinerja yang dilakukan.

Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba. Semakin tinggi jumlah laba yang dihasilkan oleh agen (manajemen), maka prinsipal akan memperoleh deviden yang semakin tinggi dan pada akhirnya agen

dianggap berhasil atau berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi (Elqorni,2009). Adanya Perbedaan “kepentingan ekonomis” diatas bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya asimetri informasi (kesenjangan informasi) antara pemegang saham (*stakeholders*) dan manajemen. Informasi asimetri biasanya terjadi disebabkan karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang dinilai lebih daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri yang biasa kita kenal dengan sebutan “*self interest*” kerana memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*). Asimetri informasi merupakan kondisi dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya.

Laporan keuangan disajikan oleh manajemen (agen) untuk memberikan sinyal kepada pengguna tentang kondisi perusahaan. Jika laporan keuangan ini tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, sebagai contoh adanya keinginan dari pihak agen untuk mengoptimalisasi kepentingannya sehingga tidak sedikit dari agen melakukan manipulasi data atas kondisi perusahaan. Dalam kaitan teori agensi dengan penerimaan opini audit going concern, agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban agen dalam hal ini adalah pihak

manajemen. Laporan keuangan ini yang nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan digunakan oleh prinsipal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari laporan keuangan inilah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat disclosure level suatu perusahaan yang tergambar dari suatu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

Eisenhardt (1989) menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan cenderung bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dan hal ini memicu terjadinya konflik keagenan sehingga diperlukan peran pihak ketiga yaitu auditor yang bersifat independen sebagai mediator antara dua kepentingan. Pihak ketiga ini bertugas untuk menilai apakah ada asimetri informasi atau manipulasi yang terjadi. Selain itu, pihak ketiga dalam hal ini adalah auditor harus mampu menjembatani kepentingan prinsipal dan agen dalam melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen, apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui sebuah sarana yaitu laporan keuangan. Tugas dari seorang auditor juga adalah memberikan jasa untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh agen yang disajikan dalam sebuah opini audit serta mampu mengungkapkan permasalahan *going concern* yang dihadapi suatu perusahaan, apabila auditor meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan teori keagenan, manajer bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu (*Timeliness*) sehingga akan terhindar dari keterlambatan pengeluaran opini oleh auditor, karena hal ini akan menyebabkan penerimaan opini audit *going concern*. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan publik. Di Indonesia, batas waktu terbitnya laporan keuangan perusahaan publik diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Perusahaan publik harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada BAPEPAM dan mengumumkannya kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan atau harus teraudit dalam jangka waktu 90 hari. Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa opini audit *going concern* lebih banyak ditemukan ketika pengeluaran opini audit terhambat.

2.1.2 Auditing

ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) dalam Halim (2008,1) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti audit secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002,9), secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif mengenai

pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Definisi-definisi diatas sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Jusup (2001,11) bahwa auditing atau pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan Agoes (2000,1) mengemukakan definisi lain mengenai auditing sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.3 Tipe-Tipe Auditing

Menurut Mulyadi (2008: 30) tipe auditing terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien untuk memberikan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi, peraturan dan undang-undang tertentu. Kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan umumnya disebut fungsi internal, karena digunakan oleh pegawai dan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operasional Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan dan bagian dari organisasi, dalam hubungannya dengan audit tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

- a. Mengevaluasi kinerja.
- b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.
- c. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

2.1.4 Opini Audit

Auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan. Dalam paragraf pendapat, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Terdapat lima jenis pendapat auditor menurut Mulyadi (2002) yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi :

- a. Semua laporan – neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
- c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkannya untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan telah dilakukan memadai dalam catatan kaki atau bagian lain laporan keuangan.
- e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak

mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan audit. Paragraf penjelasan ini dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah :

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- d. Penekanan atas suatu hal.
- e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Melalui pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan ;

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material , dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Bila auditor

menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menyebabkan ia berkesimpulan bahwa terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

5. Tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlinkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Berikut ini merupakan contoh bentuk baku laporan auditor independen dalam Bahasa Indonesia dengan opini tanpa modifikasian atas audit laporan keuangan konsolidasian tahunan emiten atau perusahaan publik menurut standar audit 700 “Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) efektif untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013.

Laporan Auditor Independen

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABC Tbk. Dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT ABC Tbk. Dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

[Nama kantor akuntan publik]

[Tanda tangan rekan]

[Nama rekan]

[Nomor izin akuntan publik]

[Nomor izin kantor akuntan publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan auditor]

[Alamat kantor akuntan publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia (2013)

2.1.5 Opini *Going Concern*

Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Auditor menetapkan penerimaan opini audit *going concern* apabila dalam proses audit ditemukan kondisi

dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan ini meliputi (SA seksi 341) :

1. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujuk untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan (SA Seksi 341) :

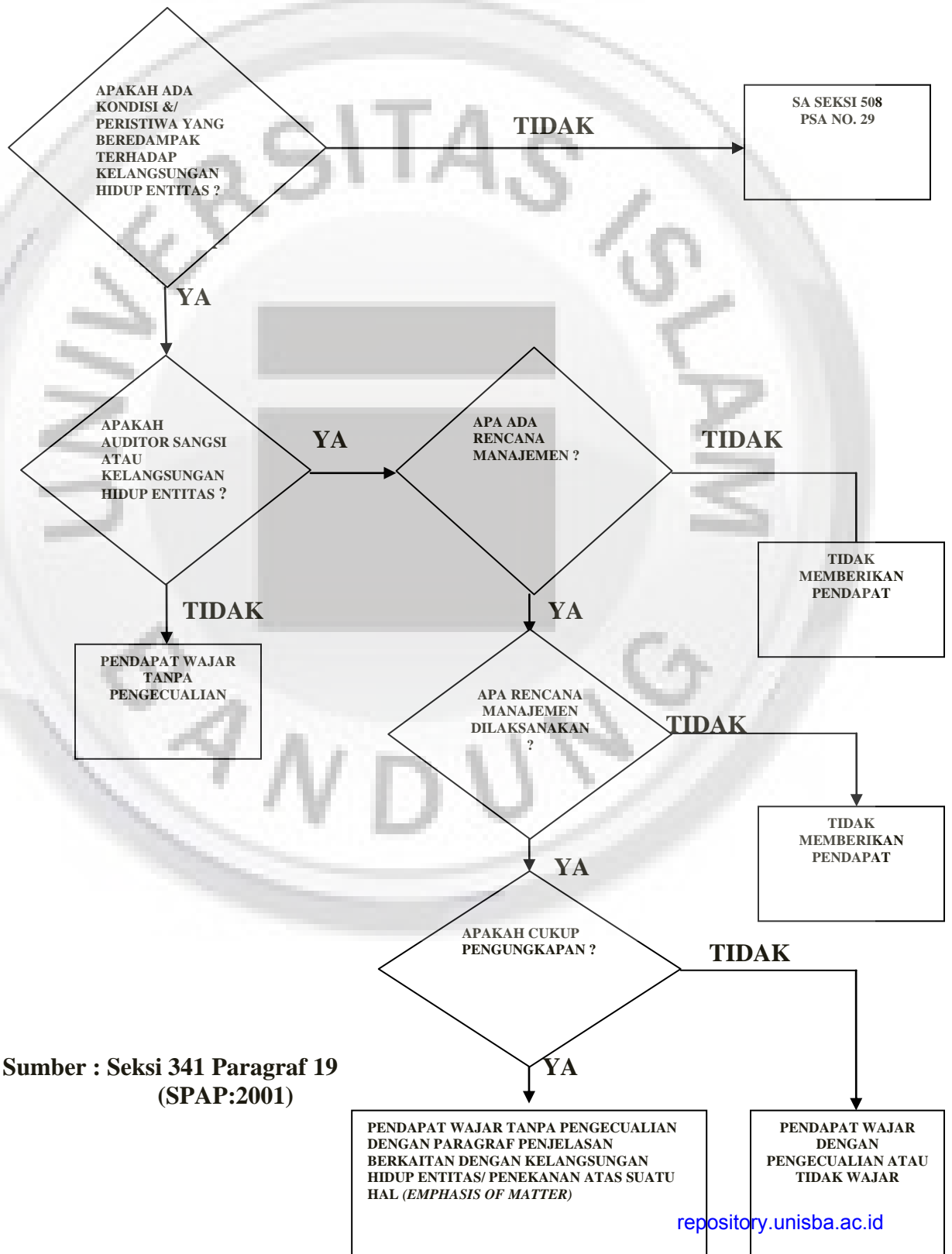
- a. Trend negatif . Contoh: kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.
- b. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. Contoh: kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
- c. Masalah *intern*. Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
- d. Masalah luar yang telah terjadi. Contoh: pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi; kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransika namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2001) menyatakan apabila auditor tidak menyangsikan kemampuan

satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) dalam jangka waktu pantas, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan jika rencana manajemen perusahaan dapat secara efektif dilaksanakan untuk mengatasi dampak dari kondisi dan peristiwa yang menyebabkan kesangsian auditor tentang kelangsungan usahanya. Apabila auditor menganggap bahwa rencana manajemen tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Opini wajar dengan pengecualian diberikan kepada *auditee* apabila auditor menyangsikan kelangsungan hidup perusahaan dan auditor berkesimpulan bahwa manajemen tidak membuat pengungkapan dan mengenai sifat, dampak, kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor menyangsikan kelangsungan hidup perusahaan. Jika pengungkapan di dalam rencana manajemen tidak memadai pengungkapannya dan tidak dilakukan penyesuaian, padahal dampaknya sangat material dan terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum, maka auditor akan memberikan opini tidak wajar.

Pertimbangan Auditor dalam memberikan opini audit *going concern* terhadap keberlangsungan usaha suatu entitas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.1

Panduan Bagi Auditor dalam Memberikan Opini Audit *Going Concern*

2.1.6 Audit Lag

Audit *lag* didefinisikan sebagai jumlah tanggal kalender antara tanggal berakhirnya laporan keuangan tahunan (31 Desember) dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Penundaan dalam publikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan dapat memecahkan masalah keuangannya sehingga dapat menghindari opini *going concern*. Berdasarkan teori agensi, manajer yang bertindak sebagai agen bertanggungjawab terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan sehingga akan terhindar dari keterlambatan pengeluaran opini oleh auditor karena hal ini mengindikasikan terdapat adanya hal yang tidak baik dalam perusahaan sehingga akan menyebabkan penerimaan opini audit *going concern* (Astuti, 2012).

Definisi lain tentang audit *lag* dikemukakan oleh Halim (2000) yang mendefinisikan audit *lag* sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Sedangkan menurut Wah Lai dan Cheuk (2005), “*An audit report lag or audit delay is a period from a company’s year-end date to the audit report date*”. Senada dengan pernyataan Halim dan Wah Lai dan Cheuk, Aryati (2005) menyebutkan *audit lag* sebagai rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Diungkap dalam penelitian Subekti dan Widiyanti (2004), perbedaan

waktu yang sering dinamai dengan audit *lag* adalah perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Maka semakin panjang *audit lag* semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Januarti (2009) mendefinisikan audit *lag* sebagai jumlah kalender antara tanggal disusunnya laporan keuangan dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu yang dapat menyebabkan adanya *audit lag* adalah standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Standar tersebut merupakan standar pertama pekerjaan lapangan yang diatur dalam SPAP. Perencanaan tersebut meliputi tiga alasan utama, yaitu:

1. Agar auditor memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang ada.
2. Membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar.
3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Perencanaan audit yang memadai ini akan mempengaruhi kinerja dari auditor. Pemenuhan standar audit dapat menyebabkan lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hasil audit tersebut. Pendapat Ashton, Willingham dan Elliot (1987) dalam (Novita, 2004) mengatakan bahwa proses audit sangat memerlukan waktu yang berakibat adanya

audit lag yang nantinya akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan

keuangan. *Audit lag* mengakibatkan berkurangnya kualitas isi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan.

Dibawah ini terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *audit lag* diantaranya :

1. Ukuran Perusahaan.

Andi (2009) berpendapat bahwa perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit lag*, karena perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan pemerintah dan lain-lain. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan.

2. Profitabilitas.

Profitabilitas mempunyai pengaruh dalam publikasi laporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah atau dengan kata lain mengalami kerugian cenderung akan menunda publikasi atas laporan keuangan karena kerugian merupakan kabar buruk yang akan berdampak negatif pada perusahaan seperti penurunan permintaan akan saham yang diterbitkan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat agar segera dapat memberitahukan kabar baik kepada publik dan mendapatkan respon yang positif dari publik (Sistya,2008).

3. Jenis Industri.

Hasil pengujian Ahmad dan Anuar (2001) mengungkapkan bahwa perusahaan sektor *financial* mempunyai *audit lag* yang lebih pendek dibandingkan perusahaan industri lain. Hal ini disebabkan karena perusahaan *financial* tidak mempunyai saldo persediaan yang cukup signifikan sehingga proses audit nya tidak memerlukan waktu yang cukup lama.

4. Lamanya Perusahaan Menjadi Klien Sebuah Kantor Akuntan Publik.

Menurut Halim (2000), semakin lama menjadi klien suatu KAP maka *audit lag* akan semakin lama. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kecenderungan skala perusahaan yang meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan menurut Ashton (1987), semakin lama menjadi klien suatu KAP maka *audit lag* akan cenderung semakin pendek dikarenakan KAP tidak perlu lagi memahami karakteristik perusahaan, sistem pengendalian internal perusahaan dan sebagainya.

5. Jenis Opini yang Diberikan Kantor Akuntan Publik.

Ahmad dan Kamarudin (2001) membuktikan bahwa *audit lag* akan lebih panjang jika perusahaan menerima pendapat *qualified* (selain pendapat *unqualified*). Fenomena ini terjadi karena proses pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan ruang lingkup audit.

6. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas.

Tingginya rasio hutang terhadap ekuitas maka hal ini mencerminkan tingginya resiko keuangan serta diasumsikan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Kesulitan keuangan tersebut merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen juga cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk. Perusahaan dengan kondisi rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan terlambat dalam penyampaian pelaporan keuangannya, karena waktu yang ada digunakan untuk menekan debt to equity ratio serendah-rendahnya (Hassanudin,2002,54P).

7. Reputasi Auditor.

Menurut Ahmad dan Kamarudin (2001), *audit lag* pada KAP *Big Five* akan cenderung lebih pendek dibandingkan dengan *audit lag* pada KAP kecil. Hal ini diasumsikan karena KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah besar, dapat mengaudit lebih efektif dan efisien, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya.

Audit Lag menurut Knechel dan Payne (2001) dibagi menjadi 3 komponen, yaitu :

1. *Sceduling Lag*, yaitu selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
2. *Fieldwork Lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
3. *Reporting Lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

2.1.7 Disclosure

Disclosure adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi. *Disclosure* dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan pihak pengguna untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan. Informasi yang didapat dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari laporan keuangan yang bersangkutan. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan (Almilia dan Retrinasari, 2007). Keuntungan dari pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan adalah sebagai berikut (Tanor,2009) :

1. Keuntungan terjadi apabila pengungkapan rinci mengenai produk baru dapat digunakan untuk menyampaikan prospek perusahaan di masa yang akan datang kepada para pemegang saham.
2. *Disclosure* dalam dunia investasi dapat berperan sebagai *public relation* bagi perusahaan yang berhubungan dengan komunitas investasi setiap saat, sehingga melalui disclosure masyarakat dapat mengetahui kondisi perusahaan.

3. *Disclosure* perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi. Konsep pengungkapan yang digunakan (Hendriksen dan Breda, 2002) yaitu:

- a. *Adequate Disclosure* (pengungkapan cukup), konsep ini digunakan untuk pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
- b. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar), tujuan etis adalah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
- c. *Full disclosure* (pengungkapan penuh), Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan secara penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan sulit ditafsirkan. Pengungkapan (*disclosure*) yang diterbitkan perusahaan ada dua jenis, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dahlan (dalam Tanor, 2009) menjelaskan bahwa pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan pengungkapan sukarela adalah merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk

keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 yang berisi tentang: (1) Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. (2) Bentuk dan isi laporan tahunan.

Tabel 2.1
Disclosure Items

No.	Keterangan
1.	Ikhtisar data keuangan penting
2.	Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan
3.	Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan
4.	Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi
5.	Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan
6.	Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha
7.	Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan perusahaan
8.	Nama dan alamat perusahaan

9.	Riwayat singkat perusahaan
10.	Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan
11.	Struktur organisasi dalam bentuk bagan
12.	Visi dan misi perusahaan
13.	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris
14.	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi
15.	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal :aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)
16.	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya
17.	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perubahan tersebut
18.	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan
19.	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal
20.	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional
21.	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan
22.	Tinjauan operasi per segmen usaha

23.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya
24.	Prospek usaha dari perusahaan
25.	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan , antara lain : strategi pemasaran dan pangsa pasar
26.	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen
27.	Tata kelola perusahaan (<i>Corporate Governance</i>)
28.	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
29.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
30.	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
31.	Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan
32.	Ringkasan statistik keuangan untuk 3-5 tahun
33.	Informasi tentang penelitian dan pengembangan

Sumber : *Disclosure Index Fitriani dan Dharma (2007)*

Pengukuran *disclosure* perusahaan dilakukan dengan menggunakan *disclosure level*. *Disclosure* item pada tabel 2.1 digunakan untuk menentukan *disclosure level* yang disajikan oleh perusahaan. Dalam menentukan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan digunakan rumus sebagai berikut (Cooke, 1992 dalam Hossain, 2008):

$$\text{Disclosure Level} = \frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

2.1.8 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu auditee dengan opini *going concern* (GCAO) dan tanpa opini *going concern* (NGCAO) (Dewayanto, 2011). Mutchler (1984) dalam Badingatus (2007) melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Mutchler (1985) dalam Badingatus (2007) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit *going concern*, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model discriminant analysis yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.

Penelitian Alexander (2004) memperkuat bukti mengenai opini audit *going concern* yang diterima tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit *going concern* tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit *going concern*, maka akan

semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan diringkas dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan tahun	Sample	Variabel dan Metode analisis	Hasil
1.	Eko Budi Setyarno, Indira Januarti, dan Faisal (2006)	Sampel 59 perusahaan manufaktur selama periode 2000-2004	Variabel Independen 1. Kualitas Audit (X1) 2. Kondisi Keuangan Perusahaan (X2) 3. Opini Audit tahun sebelumnya (X3) 4. Pertumbuhan Perusahaan (X4) Variabel Dependen Opini Audit <i>Going</i>	1. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan audit <i>going concern</i> 2. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan <i>going concern</i> . 3. Opini audit tahun sebelumnya

			<i>Concern</i>	berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit <i>going concern</i> 4. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit <i>going concern</i>
2.	Indira Januarti, 2008	Sampel perusahaan manufaktur tahun 1997-2006 sebanyak 78 perusahaan	Variable independen 1. Financial distress 2. Kualitas Audit 3. Dept Default 4. Insales 5. Opini tahun sebelumnya 6. Auditor lag 7. Lamanya perikatan 8. <i>Opinion shopping</i>	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> terhadap opini audit <i>going concern</i> 2. Kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan

			9.Kepemilikan manajerial	terhadap opini audit
			10.Kepemilikan institusional	3. <i>Default</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i>
			Variable dependen Opini audit <i>going concern</i>	4. <i>In sales</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i>
				5. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i>

				<p>6. <i>Audit lag</i></p> <p>berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i></p> <p>7. Lamanya perikatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i></p> <p>8. <i>Opinion shopping</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i></p> <p>9. Kepemilikan</p>
--	--	--	--	--

				<p>manajerial</p> <p>berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i></p> <p>10. Kepemilikan institusional</p> <p>berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i></p>
3.	Junaidi dan Jogiyanto Hartono (2010)	Faktor Non Keuangan pada Opini <i>Going Concern</i>	<i>Tenure</i> , reputasi auditor, <i>disclosure</i> dan <i>size</i>	<p><i>Tenure</i>, reputasi dan <i>disclosure</i> berpengaruh secara signifikan</p> <p>Size tidak berpengaruh secara signifikan</p>

4.	Santosa dan Linda Kusumaning Wedari (2007)	Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i>	Kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan	-Kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan -Kondisi keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh secara <i>negative</i> , Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif
----	---	---	--	--

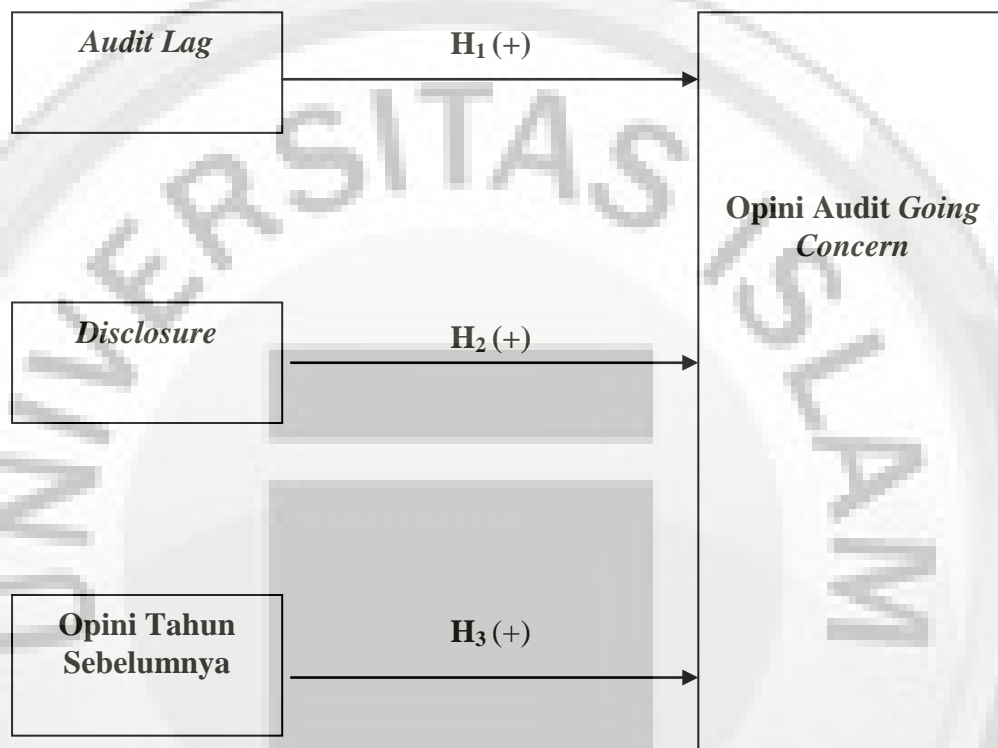
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan opini audit *going concern* dan variabel independen adalah Audit *Lag*, *Disclosure*, dan opini tahun sebelumnya. Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran:

2.2 Gambar Kerangka Pemikiran

Variabel Independen

Variabel Dependen



2.4 Perumusan Hipotesis

Di bagian ini akan diajukan beberapa hipotesis dan argumentasi yang mendasari hipotesis tersebut.

2.4.1 Pengaruh *Audit Lag* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Audit lag adalah jumlah kalender antara tanggal disusunnya laporan keuangan dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan (Januarti, 2009). Januarti dan

Fitrianasari (2008) mengindikasikan kemungkinan keterlambatan opini yang dikeluarkan dapat disebabkan karena:

1. Auditor lebih banyak melakukan pengujian.
2. Manajemen mungkin melakukan negosiasi dengan auditor.
3. Auditor memperlambat pengeluaran opini dengan harapan manajemen dapat memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga terhindar dari opini *going concern*.

Berdasarkan teori keagenan, manajer bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu sehingga akan terhindar dari keterlambatan pengeluaran opini oleh auditor, karena hal ini akan menyebabkan penerimaan opini audit *going concern*. Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa opini audit *going concern* lebih banyak ditemukan ketika pengeluaran opini audit terlambat. Penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) menunjukkan bahwa audit lag berpengaruh positif terhadap penerimaan opini *going concern*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ke satu yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁: Audit Lag berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.2 Pengaruh *Disclosure* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang akan mempengaruhi atas suatu keputusan investasi. *Disclosure* dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang memungkinkan pihak pengguna untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan (Almilia dan Retrinasari, 2007). Verdiana dan utama (2013) menyatakan bahwa *disclosure* berpengaruh positif dan signifikan pada kemungkinan pengungkapan opini audit *going concern*. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa *disclosure* berpengaruh signifikan pada penerimaan audit *going concern*. Hasil tersebut memiliki indikasi bahwa luasnya pengungkapan perusahaan akan memberikan tambahan bukti kepada auditor untuk memastikan bahwa terdapat masalah kelangsungan hidup yang dialami perusahaan sehingga auditor akan mengeluarkan *opini audit going concern*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₂ : *Disclosure* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.4.3 Pengaruh Opini Audit *Going Concern* Tahun Sebelumnya Terhadap

Penerimaan Opini Audit *Going Concern*.

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu auditee dengan opini *going concern* (GCAO) dan tanpa opini *going concern* (NGCAO) (Dewayanto, 2011). Opini audit *going concern* yang telah diterima auditee pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan auditee tidak menunjukkan tanda – tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.

Mutchler (1985) dalam Badington (2007) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap opini audit *going concern*, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model *discriminant analysis* yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.

Santosa dan Wedari (2007) menganalisis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sehingga apabila auditee menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya, maka kemungkinan auditee untuk menerima kembali opini *audit going concern* pada tahun berikutnya akan semakin

besar. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H₃ : Opini audit tahun sebelumnya berpen-
garuh positif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*.**

